



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENSTRA 2025 - 2029

Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan BPKAD, dokumen ini juga menunjukkan peran BPKAD dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi pada periode pemerintahan tahun 2025 - 2029. Secara umum, Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029

Selain itu, penyusunan Renstra BPKAD juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perkembangan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dan perekonomian Kota Bekasi sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BPKAD diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BPKAD dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah Permendagri 86 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebaai amanat regulasi.

Sebagai pengelola keuangan daerah, maka aspek keuangan daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang terkadang menjadi bahan permasalahan yang dihadapi di daerah dan berkaitan dengan keuangan daerah.

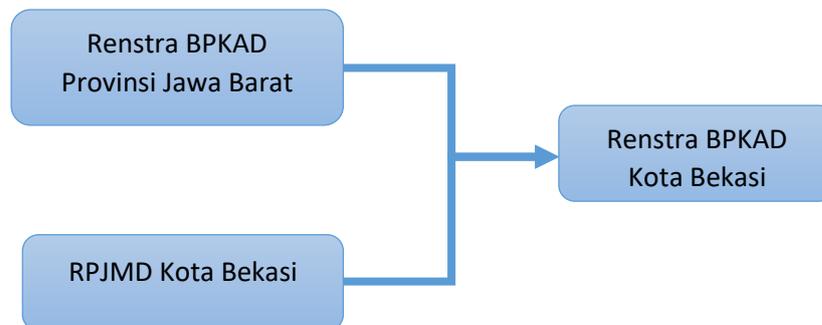
Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi :
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,

Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi untuk kurun waktu 2025 - 2029 maka perlu disusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA. Dengan demikian RPJMD Kota Bekasi menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Organisasi Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Gambar 1.1

Hubungan antara Renstra BPKAD Provinsi – RPJMD Kota Bekasi – Renstra BPKAD Kota Bekasi



Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra BPKAD Kota Bekasi dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra BPKAD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah seperti

perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta pengelolaan badan milik daerah yang optimal. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD juga tetap memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Barat untuk menyelaraskan program Pengelolaan Keuangan serta perlunya memperhatikan adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Renstra BPKAD Kota Bekasi tahun 2025 - 2029 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diganti menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Wali kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi;
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah untuk penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan BPKAD Kota Bekasi beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025 – 2029.
- 2) Memberikan pedoman bagi BPKAD Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2025 - 2029);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja BPKAD Kota Bekasi khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan.
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sistematika penulisan Renstra BPKAD Kota Bekasi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum.

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Kerjasama daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Insfrastruktur oleh APBD dan/ atau APBD provinsi di Kabupaten/ Kota; dan
 - d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029.
3. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Isu Strategis Daerah

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat :
 - a. Visi dan Misi; dan

- b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029
- 2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029; dan
 - b. Program – program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
- 2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagian bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan ketentuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola Keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara Tipologi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong ke dalam Tipe A yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, yakni :

- **KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Keuangan Daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;

- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang keuangan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

- **BIDANG ANGGARAN**

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- **BIDANG PERBENDAHARAAN**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- **BIDANG AKUNTANSI**

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi kebijakan dan informasi akuntansi pemerintah daerah, evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran. untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- **BIDANG ASET**

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan potensi aset daerah serta pengamanan dan penghapusan aset.

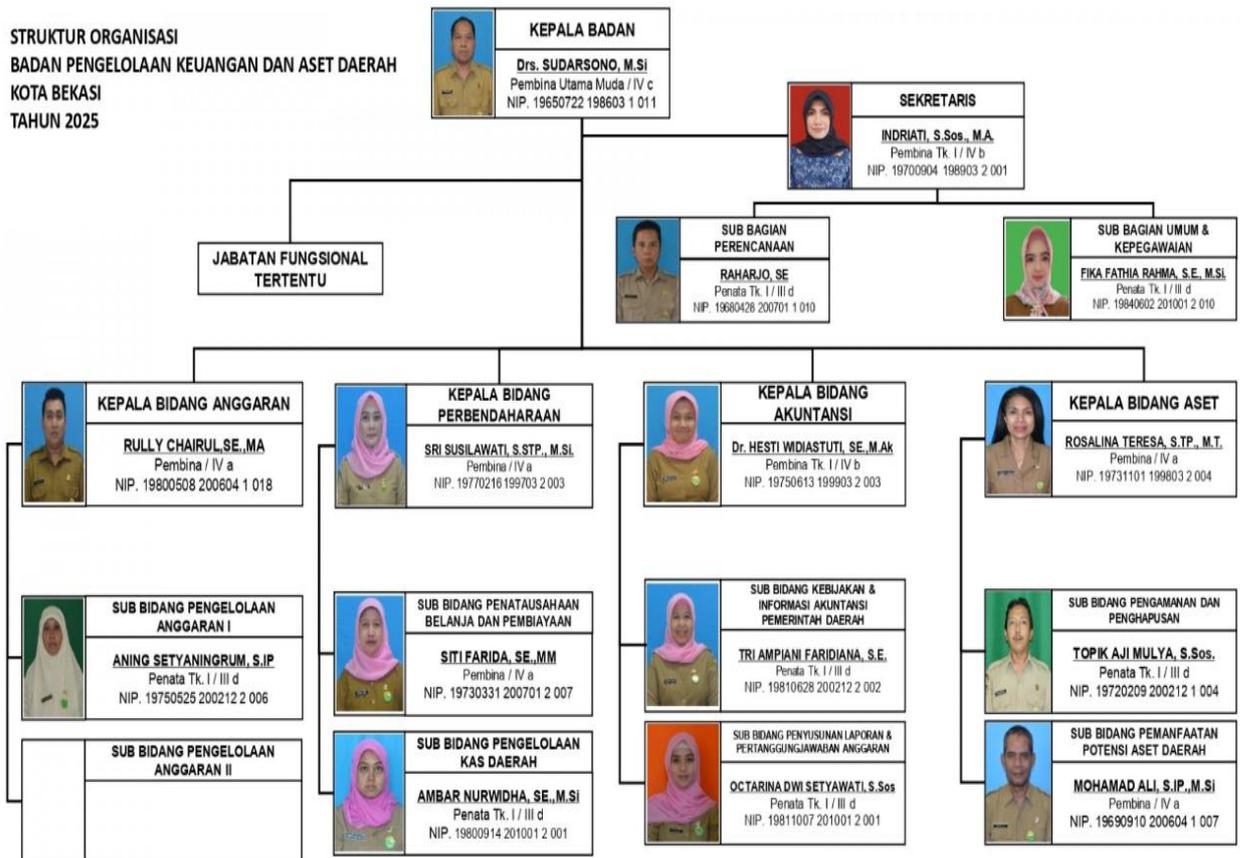
- **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan di atas, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- e. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025



2.1.2 Sumber Daya BPKAD

Kondisi dan potensi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain : Peraturan Wali kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Secara kuantitatif, sesuai data per tanggal 1 Januari 2025 BPKAD memiliki jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 161 orang, terdiri dari 92 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 68 orang PPPK dan 1 orang Non ASN, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS di Lingkungan BPKAD Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN PNS	JUMLAH
1.	S-3	1
2.	S-2	24
3.	S-1	54
4.	D IV	6
5.	Sarjana Muda/ D III	7
6.	SLTA	
Jumlah		92

Sumber : Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN PPPK di Lingkungan
BPKAD Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN ASN PPPK	JUMLAH
1.	S-2	-
2.	S-1	43
3.	DIV	-
4.	Sarjana Muda/ D III	8
5.	D II	-
6.	SLTA/ Paket C	16
Jumlah		68

Sumber : Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan
BPKAD Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

	KLASIFIKASI PENDIDIKAN NON ASN	JUMLAH
1.	Non ASN (S1)	1
Jumlah		1

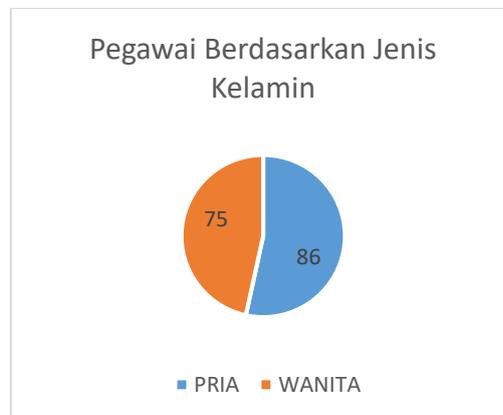
Sumber : Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah PNS di Lingkungan BPKAD Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang

No	KLASIFIKASI GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1.	IV/c	1
2.	IV/b	2
	IV/a	6
SUB JUMLAH GOL IV		9
3.	III/d	41
4.	III/c	17
5.	III/b	11
6.	III/a	6
SUB JUMLAH GOL III		75
7.	II/d	3
8.	II/c	5
9.	II/b	-
SUB JUMLAH GOL II		8
JUMLAH TOTAL		92

Sumber : Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2025

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Kota Bekasi
Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2025

Kebutuhan Pegawai BPKAD Kota Bekasi

Tabel 2.5
KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
JABATAN STRUKTURAL										
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	BPKAD			1	1		0	
Sekretariat										0
1	Sekretaris Badan	12	BPKAD			1	1		0	
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9		Sekretariat		1	1		0	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9		Sekretariat		1	1		0	
Bidang Akuntansi										0
1	Kepala Bidang Akuntansi	11	BPKAD			1	1		0	
2	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	9		Bidang Akuntansi		1	1		0	
3	Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran	9		Bidang Akuntansi		1	1		0	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
Bidang Anggaran										
1	Kepala Bidang Anggaran	11	BPKAD			1	1		0	
2	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1	9		Bidang Anggaran		1	1		0	
3	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2	9		Bidang Anggaran		1	0		1	
Bidang Perbendaharaan										
1	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	BPKAD			1	1		0	
2	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	9		Bidang Perbendaharaan		1	1		0	
3	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan	9		Bidang Perbendaharaan		1	1		0	
Bidang Aset										
1	Kepala Bidang Aset	11	BPKAD			1	1		0	
2	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah	9		Bidang Aset		1	1		0	
3	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset	9		Bidang Aset		1	1		0	
JABATAN FUNGSIONAL										
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Madya	11	BPKAD			5	0		5	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
Sekretariat										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda	9		Sekretariat		2	1		1	
2	Arsiparis Ahli Muda	9		Sekretariat		4	4		0	
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
1	Arsiparis Ahli Pertama	8		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2		0	
2	Arsiparis Mahir (Terampil Lanjutan)	7		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	2		2	
3	Arsiparis Terampil	6		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	0		4	
Bidang Akuntansi										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda	9		Bidang Akuntansi		4	3		1	
Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Pertama	8		Bidang Akuntansi	Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	1	0		1	
Bidang Anggaran										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda	9		Bidang Anggaran		6	6		0	
2	Pranata Komputer Ahli Muda	9		Bidang Anggaran		2	2		0	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Pertama	8		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1	1	0		1	
1	Pranata Komputer Ahli Pertama	8		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1	1	0		1	
Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2										
1	Pranata Komputer Ahli Pertama	8		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2	2	0		2	
Bidang Perbendaharaan										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda	9		Bidang Perbendaharaan		4	3		1	
Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Pertama	8		Bidang Perbendaharaan	Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan	1	0		1	
Bidang Aset										
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda	9		Bidang Aset		4	3		1	
Jabatan Pelaksana										
Sekretariat										
Sub Bagian Perencanaan										
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7		Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan	6	2	3	1	0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
1	Analisis SDM Aparatur	7		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	2	5	-4	0
2	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	0	1	0
3	Pengelola Barang Milik Negara	6		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	4	-3	0
4	Pengadministrasi Umum	5		Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	1	10	-8	1
Substansi Keuangan										
1	Bendahara	7		Sekretariat		2	2	0	0	0
2	Verifikatur Keuangan	6		Sekretariat		3	3	2	-2	0
3	Pengadministrasi Keuangan	5		Sekretariat		2	2	3	-3	0
Bidang Akuntansi										
Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah										
1	Analisis Keuangan	7		Bidang Akuntansi	Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	2	1	1	0	0
2	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7		Bidang Akuntansi	Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	4	0	2	2	0
Substansi Evaluasi Pelaporan										

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
1	Penata Laporan Keuangan	7		Bidang Akuntansi		5	1	5	-1	0
Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran										
1	Analisis Laporan Keuangan	7		Bidang Akuntansi	Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran	4	1	2	1	0
Bidang Anggaran										
Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1										
1	Analisis Perencanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1	3	2	2	-1	0
2	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1	2	0	0	2	0
Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2										
1	Analisis Perencanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2	3	1	1	1	0
2	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2	2	0	0	2	0
Substansi Pengelolaan Anggaran 3										
1	Analisis Perencanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran		3	0	0	3	0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
2	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	7		Bidang Anggaran		2	1	1	0	0
Bidang Perbendaharaan										
Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan										
1	Analisis Perbendaharaan	7		Bidang Perbendaharaan	Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan	2	1	0	1	0
2	Verifikatur Keuangan	6		Bidang Perbendaharaan	Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan	7	5	5	-3	0
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah										
1	Analisis Perbendaharaan	7		Bidang Perbendaharaan	Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	1	2	0	-1	0
2	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6		Bidang Perbendaharaan	Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	6	1	7	-2	0
Substansi Pengelolaan Gaji Daerah										
1	Analisis Perbendaharaan	7		Bidang Perbendaharaan		1	0	0	1	0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan		Kebutuhan	
							PNS	TKK	PNS	PPPK
2	Pengolah Daftar Gaji	6		Bidang Perbendaharaan		6	6	1	-1	0
Bidang Aset										
Substansi Penatausahaan Aset										
1	Analisis Aset Daerah	7		Bidang Aset		7	6	5	-4	2
Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah										
1	Analisis Aset Daerah	7		Bidang Aset	Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah	7	5	5	-3	0
Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset										
1	Penyusun Rencana Hasil Telaahan usul Penghapusan Barang	7		Bidang Aset	Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset	7	4	5	-2	0
Total						160	92	69	-1	3

Sumber data umum dan kepegawaian bpkad

Berdasarkan Tabel diatas tentang Rekapitulasi Kebutuhan Dan Ketersediaan Aparatur di atas, Kebutuhan Pegawai di BPKAD Kota Bekasi sudah mencukupi.

Sarana dan Prasarana Penunjang BPKAD Kota Bekasi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sampai dengan mei 2025 memiliki aset sesuai dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.6

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG BPKAD KOTA BEKAS

No.	Sarana dan Prasarana	KONDISI			
		Baik	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA EMPAT	21	1	0	22
2	KENDARAAN RODA DUA	65	4	0	69
3	LEMARI BESI	60	2	9	71
4	LEMARI KAYU	7	1	2	10
5	LEMARI ARSIP	27	2	6	35
6	FILLING KABINET	31	2	3	36
7	RAK BESI	152	2	0	154
8	BAND KAS	1	0	0	1
9	BUFFET KAYU	3	0	0	3
10	MEJA KERJA PEGAWAI	171	3	6	180
11	MEJA KERJA ESELON IV	17	2	4	23
12	MEJA KERJA ESELON III	5	0	0	5
13	MEJA KERJA ESELON II	1	1	0	2
14	MEJA TAMU	6	0	0	6
15	MEJA RAPAT	2	0	0	2
16	SOFA	7		0	7
17	KURSI KERJA PEGAWAI	171	3	6	180
18	KURSI KERJA ESELON IV	15	0	2	17
19	KURSI KERJA ESELON III	5	0	0	5
20	KURSI KERJA ESELON II	1	1	0	2
21	KURSI RAPAT	50	0	0	50
22	KOMPUTER	223	2	16	241
23	LAPTOP	17	0	0	17
24	NOTE BOOK	25	5	0	30
25	PRINTER	131	2	5	138

No.	Sarana dan Prasarana	KONDISI			
		Baik	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
26	SCENNER	12	0	4	16
27	ALAT PENGHANCUR KERTAS	13	2	3	18
28	AC SPLIT	25	2	5	32

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai AKIP BPKAD masih masih masuk dalam kategori Baik, Meskipun penilaiannya pada Tahun 2021 sedikit dibawah target yaitu mencapai angka 84,12
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari tahun 2019 belum memiliki target, penilaian dilakukan langsung oleh kemendagri dengan melihat 6 Dimensi yaitu : Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini Badan Pemeriksaan Keuangan
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2019 – 2023 mendapatkan 2 WTP dan 3 WDP, dalam tahun 2021 – 2023 kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam meraih opini BPK dinyatakan tidak terwujud karena sebab hal External.
4. Ketepatan waktu penetapan APBD setiap tahun nya dinyatakan berhasil tepat waktu, dimana Perda APBD ditetapkan sebelum tahun berjalan.

Secara umum, Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menunjukkan hasil yang memuaskan dengan sebagian besar indikator berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang operasional dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi tentunya didukung dengan adanya Standar Operasional Aparatur (SOP) yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	NAMA / JUDUL SOP
1	Penerbitan Surat Perjalanan Dinas
2	Pengelolaan Surat Keluar
3	Pengelolaan Surat Masuk
4	Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
6	Stok Opname Persediaan
7	Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB)
8	Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
9	Perpanjangan Pajak Kendaraan
10	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
11	Usulan Pembuatan Kartu Istri/ Kartu Suami
12	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai
13	Usulan Kartu Pegawai
14	Usulan Kenaikan Gaji Berkala
15	Usulan Permohonan Cuti
16	Usulan Kenaikan Pangkat
17	Pengelolaan Layanan Pengaduan Online Terpadu (POT), Smart Online Supporting and Observation Tools (SOROT) DAN Unit Reaksi Cepat (URC)
18	Pemindahan Arsip In Aktif Ke Depo Arsip
19	Pengelolaan Arsip In Aktif
20	Peminjaman Arsip In Aktif
21	Rekapitulasi Belanja Modal
22	Inventarisasi Aset / Sensus Barang
23	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Mutasi Aset
24	Usulan Penghapusan Aset
25	Rekonsiliasi Dan Pemutakhiran Data Posisi Aset Tetap
26	Penyusunan Laporan Aset Semesteran
27	Penyusunan Laporan Aset Tahunan Pada Akuntansi Keuangan
28	Penyusunan Rencana Strategis (RESTR)
29	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
30	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik dengan Aplikasi Emonev
31	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
32	Penyusunan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS)
33	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Hibah dan Bantuan Sosial
34	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran - Gaji Uang (SPP - GU) Dan Tambahan Uang (TU) Nihil

NO	NAMA / JUDUL SOP
35	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - Uang Persediaan (UP)
36	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) = Ganti Uang (GU)
37	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - LS dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Barang dan Jasa
38	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Belanja Subsidi
39	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
40	Verifikasi Keuangan
41	Penyusunan Neraca
42	Penyusunan Laporan Keuangan
43	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar - LS Belanja Tidak Terduga (BTT)
44	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (PARPOL)
45	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Belanja Pembiayaan
46	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) _ LS dan Surat Perintah Membayar (SPM) - LS Belanja Gaji dan Tunjangan
47	Pengumpulan dan Pengolahan Dan Capaian Kinerja
48	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
49	Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
50	Penyusunan Laporan Realisasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
51	Penempatan Uang Daerah
52	Penyusunan Laporan Posisi Kas Harian
53	Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Antara BPKAD dengan Pihak Bank
54	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji
55	Penerbitan dan Penatausahaan Daftar Gaji Perangkat Daerah (PD)
56	Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pegawai
57	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Daerah
58	Rekonsiliasi Akun Pengeluaran Pemerintah Kota Bekasi
59	Rekonsiliasi Akun Pengeluaran SKPD
60	Validasi Akun Pengeluaran SKPD
61	Validasi Akun Kas di Bendahara Penerimaan SKPD
62	Validasi Akun Penerimaan SKPD
63	Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja
64	Penerimaan Barang Persediaan Dari Hibah/Sumbangan
65	Penerimaan Barang Persediaan Dari <i>Corporate social responsibility (CSR)</i>
66	Penerimaan Barang Non Persediaan Dari Hibah/Sumbangan

NO	NAMA / JUDUL SOP
67	Penerimaan Barang Non Persediaan Dari <i>Corporate social responsibility (CSR)</i>
68	Pengeluaran/Mutasi Barang Persediaan Dari Hibah/Sumbangan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
69	Pengeluaran/Mutasi Barang Non Persediaan Dari Hibah/Sumbangan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
70	Pengukuran Kinerja
71	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
72	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Dan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
73	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
74	Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
75	Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Analisis Standar Belanja
76	Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
77	Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
78	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
79	Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
80	Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
81	Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Kota Bekasi
82	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Oleh Wali Kota
83	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
84	Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah (BMD)
85	Perpanjangan Waktu Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah (BMD)
86	Perpanjangan Sewa Pemanfaatan Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
87	Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
88	Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
89	Sewa Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
90	Pembebasan Retribusi Kekayaan Daerah Untuk Sarana Ibadah
91	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

NO	NAMA / JUDUL SOP
92	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
93	Perpanjangan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
94	Tender Pemanfaatan Barang Milik Daerah
95	Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Secara Sepihak Oleh Wali Kota
96	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Mekanisme Bangunan Serah Guna/Bangun Guna Serah Pada Pengelola Barang
97	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Mekanisme Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Pada Pengelola Barang
98	Pegakhiran Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Secara Sepihak Oleh Wali Kota
99	Pegakhiran Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Karena Berakhirnya Jangka Waktu KSPI
100	Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi
101	Penjualan Barang Milik Daerah (BMD)
102	Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara Dan Mantam Pejabat Negara
103	Penjualan Bongkaran Bangunan/Gedung Dengan Nilai Limit Bongkaranan Di Bawah Rp. 30.000.000
104	Penjualan Bongkaran Bangunan/Gedung Dengan Nilai Limit Bongkaranan Di Atas Rp. 30.000.000
105	Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
106	Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang
107	Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
108	Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan/ Atau Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
109	Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Sebab Lain Pada Pengelolaan Barang
110	Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Berdasarkan Bendahara Atau Pejabat Lain
111	Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
112	Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Kota Bekasi
113	Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Melalui Mekanisme Sewa
114	Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD)
115	Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pengelola Barang
116	Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Permohonan Pihak Lain

NO	NAMA / JUDUL SOP
117	Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
118	Hibh Barang Milik Daerah Berdasarkan Inisiatif Wali Kota
119	Hibh Barang Milik Daerah yang Berdasarkan Permohonan Pihak Lain
120	Pencatatat Barang Milik Daerah yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/Sumber Dana Pemerintah Pusat/Provinsi/JKN/BOS
121	Korekasi Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Disebabkan Karena Double Catat Pada Neraca
122	Pencatatan Baran Milik Daerah yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/Sumber Dana Selain Pemerintah Pusat/Provinsi/JKN/BOS
123	Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Atau Unit Kerja Lainnya Yang Sejenis
124	Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berupa Jalan, Irigasi Dan Jaringan
125	Validasi Barang Milik Daerah Unuk Pencatatan Aset Ttap (Selain Tanah Jalan Bernilai Rp. 0 Dan Rp. 1 Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita Acara Serah Terima)
126	Validasi Barang Milik Daerah Unuk Pencatatan Aset Ttap (Tanah Jalan Bernilai Rp. 0 Dan Rp. 1 Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita Acara Serah Terima)
127	Inventarisasi Barang Milik Daerah
128	Sensus Barang Milik Daerah
129	Kapitalisasi Rehabilitasi Aset Tetap Gedungg Dan Bangunan Serta Jalan, Jaringan Dan Irigasi Pada Aset Induk Neraca Pemerintah Kota Bekasi
130	Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
131	Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pengeluaran Belanja Tanggap Darurat Bencana
132	Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat, Belanja Keperluan Mendesak Serta Diluar Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak
133	Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang telah di tutup
134	Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Soaial yang Tidak Dapat Direncanakan
135	Penilaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
136	Rekonsiliasi Data Pendapatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
137	Rekon Data Belanja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

NO	NAMA / JUDUL SOP
138	Rekonsiliasi Data Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
139	Rekonsiliasi Data Kas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
140	Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
141	Pengakuan Utang Atas Penundaan Pembayaran Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
142	Reklasifikasi Belanja Karena Kesalahan Input Pada Proses Pembuatan Surat Perintah Membayar Pemerintah Kota Bekasi

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan sasaran/target indikator kinerja, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang termuat pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2024-2026, adapun realisasi telah berjalan 1 periode Tahun Anggaran yaitu pada pada Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 2.9
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun	Urusan Keuangan	43.371.241.404	38.177.138.233	88,02	202.143.945.310	173.102.138.596,33	85,63	245.515.186.714	211.279.276.829	86,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.042.745.296	32.510.799.651	95,50	80.834.383.863	64.064.240.656	79,25	114.877.129.159	96.575.040.307	84,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.134.051.156	24.568.549.996	97,75	80.834.383.863	64.064.240.656	79,25	105.968.435.019	88.632.790.652	83,64
	Belanja Gaji Pokok PNS	5.217.616.376	5.200.127.045	99,66	1.286.374.624	404.757.580	31,46	6.503.991.000	5.604.884.625	86,18
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506.980.879	505.270.844	99,66	319.212.121	18.149.792	5,69	826.193.000	523.420.636	63,35
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219.626.750	202.930.000	92,40	71.780.250	-	0,00	291.407.000	202.930.000	69,64
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.206.000	265.340.000	98,56	257.380.000	-	0,00	526.586.000	265.340.000	50,39

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	153.042.750	133.900.000	87,49	158.995.250	23.885.000	15,02	312.038.000	157.785.000	50,57
	Belanja Tunjangan Beras PNS	311.768.100	282.220.740	90,52	177.976.900	15.570.300	8,75	489.745.000	297.791.040	60,81
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.582.905	25.595.914	100,05	19.031.095	507.144	2,66	44.614.000	26.103.058	58,51
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.946	71.307	96,43	221.054	5.381	2,43	295.000	76.688	26,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.752.194.000	13.299.083.748	96,71				13.752.194.000	13.299.083.748	96,71
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.742.453.000	3.661.476.087	97,84				3.742.453.000	3.661.476.087	97,84
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	373.600.000	334.767.943	89,61				373.600.000	334.767.943	89,61
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.900.000	71.919.575	98,66				72.900.000	71.919.575	98,66
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	438.987.301	523.314.072	119,21	57.803.056.617	48.452.316.928	83,82	58.242.043.918	48.975.631.000	84,09
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-		12.971.674.000	10.144.077.973	78,20	12.971.674.000	10.144.077.973	78,20
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.001.913	10.687.181	356,01	1.217.288.112	965.749.950	79,34	1.220.290.025	976.437.131	80,02

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-		432.145.000	285.492.689	66,06	432.145.000	285.492.689	66,06
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.017.236	32.061.540	118,67	3.633.854.840	2.897.249.850	79,73	3.660.872.076	2.929.311.390	80,02
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-		1.296.433.000	856.478.069	66,06	1.296.433.000	856.478.069	66,06
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-		288.660.000	-	0,00	288.660.000	-	0,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-		900.301.000	-	0,00	900.301.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	19.784.000	98,92				20.000.000	19.784.000	98,92
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	17.500.000	17,50				100.000.000	17.500.000	17,50
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	17.500.000	17,50				100.000.000	17.500.000	17,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.537.867.500	2.307.497.153	90,92				2.537.867.500	2.307.497.153	90,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.431.150.000	1.404.877.600	98,16				1.431.150.000	1.404.877.600	98,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.750.000	148.620.100	75,54				196.750.000	148.620.100	75,54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	32.373.520	64,75				50.000.000	32.373.520	64,75

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	24.982.000	33,31				75.000.000	24.982.000	33,31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.250.000	339.535.933	84,62				401.250.000	339.535.933	84,62
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	383.717.500	357.108.000	93,07				383.717.500	357.108.000	93,07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.087.576.000	1.039.550.000	95,58				1.087.576.000	1.039.550.000	95,58
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.087.576.000	1.039.550.000	95,58				1.087.576.000	1.039.550.000	95,58
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.803.250.640	3.583.813.558	94,23				3.803.250.640	3.583.813.558	94,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.803.250.640	3.583.813.558	94,23				3.803.250.640	3.583.813.558	94,23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.320.000.000	935.492.644	70,87				1.320.000.000	935.492.644	70,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520.000.000	336.428.100	64,70				520.000.000	336.428.100	64,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	174.853.200	69,94				250.000.000	174.853.200	69,94

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	424.211.344	77,13				550.000.000	424.211.344	77,13
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.145.343.208	4.210.638.567	81,83	121.309.561.447	109.037.897.940,33	89,88	126.454.904.655	113.248.536.507	89,56
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.944.314.500	1.641.316.240	84,42				1.944.314.500	1.641.316.240	84,42
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.000.000	100.962.650	83,44				121.000.000	100.962.650	83,44
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	125.000.000	66.410.000	53,13				125.000.000	66.410.000	53,13
	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	61.329.900	51.940.000	84,69				61.329.900	51.940.000	84,69
	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	61.329.900	6.192.000	10,10				61.329.900	6.192.000	10,10
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	47.574.900	29.723.000	62,48				47.574.900	29.723.000	62,48
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50.649.800	43.721.640	86,32				50.649.800	43.721.640	86,32
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	158.892.000	146.297.150	80,00				158.892.000	146.297.150	92,07

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	236.625.000	231.692.298	97,92				236.625.000	231.692.298	97,92
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.500.000	119.455.500	85,63				139.500.000	119.455.500	85,63
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	270.027.000	225.799.302	83,62				270.027.000	225.799.302	83,62
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	211.480.000	205.015.000	96,94				211.480.000	205.015.000	96,94
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	460.906.000	414.107.700	89,85				460.906.000	414.107.700	89,85
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.155.255.708	907.542.070	78,56				1.155.255.708	907.542.070	78,56
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	685.228.708	640.630.000	93,49				685.228.708	640.630.000	93,49
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	107.472.000	-	0,00				107.472.000	-	0,00

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	115.760.000	92.714.400	80,09				115.760.000	92.714.400	80,09
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	82.440.000	39.427.670	47,83				82.440.000	39.427.670	47,83
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.355.000	97.970.000	93,88				104.355.000	97.970.000	93,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.000.000	36.800.000	61,33				60.000.000	36.800.000	61,33
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2.045.773.000	1.661.780.257	81,23				2.045.773.000	1.661.780.257	81,23
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	196.490.000	189.049.730	96,21				196.490.000	189.049.730	96,21
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	62.150.000	56.112.000	90,28				62.150.000	56.112.000	90,28

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	193.695.000	159.294.400	82,24				193.695.000	159.294.400	82,24
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	243.788.000	182.671.169	74,93				243.788.000	182.671.169	74,93
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	159.798.000	96.198.470	60,20				159.798.000	96.198.470	60,20
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Akuntansi	191.375.000	141.316.679	73,84				191.375.000	141.316.679	73,84
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	312.880.000	238.275.400	76,16				312.880.000	238.275.400	76,16
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	482.656.000	437.725.109	90,69				482.656.000	437.725.109	90,69
	Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	202.941.000	161.137.300	79,40				202.941.000	161.137.300	79,40

*SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				121.309.561.447	109.037.897.940	89,88	121.309.561.447	109.037.897.940	89,88
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15.969.208.697	3.697.545.190	23,15	15.969.208.697	3.697.545.190	23,15
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				105.340.352.750	105.340.352.750	100,00	105.340.352.750	105.340.352.750	100,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.183.152.900	1.455.700.015	34,80				4.183.152.900	1.455.700.015	34,80
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.183.152.900	1.455.700.015	34,80				4.183.152.900	1.455.700.015	34,80
	Penyusunan Standar Harga	368.273.900	140.876.000	38,25				368.273.900	140.876.000	38,25
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	114.225.000	75.352.523	65,97				114.225.000	75.352.523	65,97
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	300.000.000	29.476.000	9,83				300.000.000	29.476.000	9,83
	Pengamanan Barang Milik Daerah	973.132.000	392.044.852	40,29				973.132.000	392.044.852	40,29
	Penilaian Barang Milik Daerah	1.450.000.000	95.016.000	6,55				1.450.000.000	95.016.000	6,55
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	421.280.000	281.750.600	66,88				421.280.000	281.750.600	66,88

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	-	0,00				100.000.000	-	0,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	456.242.000	441.184.040	96,70				456.242.000	441.184.040	96,70

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa BPKAD selain OPD juga sebagai SKPKD, maka berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebagai OPD dan SKPKD tahun 2024 memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 245.515.186.714,00 dengan realisasi Rp. 211.279.276.829,33 atau 86,06%. Pagu Anggaran BPKAD sebagai SKPKD sebesar Rp. 202.143.945.310,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.102.138.596,33 prosentase 85,63%, sedangkan pagu anggaran BPKAD selaku OPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.371.241.404,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.177.138.233,00 atau 88,02%.

BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Nilai AKIP BPKAD, indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Opini WTP atau sebesar 100% dari target Opini WTP sebesar (100%), atau dengan capaian kinerja sebesar 93,40 % dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk meraih kembali capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kemampuan PPK SKPD untuk mendeteksi kesalahan prosedur saat proses SPJ.
3. Memberikan sosialisasi kepada Pengelola Administrasi cara menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa.
4. Mengganti aplikasi pengelolaan aset dengan aplikasi yang lebih akuntabel.
5. Melakukan pendampingan khusus kepada SKPD mengenai pengelolaan keuangan dan persediaan.
6. Mengevaluasi DPA yang berpotensi salah kode rekening saat

- penganggaran.
7. Studi Tiru ke daerah yang APBD memiliki resiko yang sama dengan Kota Bekasi.
 8. Konsinyering penyusunan LK SKPD dan LKPD Kota Bekasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah berbagai pihak yang memerlukan layanan terkait keuangan dan aset antara lain Perangkat Daerah, organisasi/Lembaga/masyarakat, akademisi, Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.

Adapun layanan yang diberikan BPKD Kota Bekasi kepada masing-masing kelompok sasaran penerima layanan tersebut antara lain:

a. Perangkat Daerah

Sebagai pengampu urusan Pengelola Keuangan BPKAD memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dan verifikasi baik dalam penyusunan RKA, Laporan Keuangan, dan Kas Daerah Perangkat Daerah.

Sedangkan sebagai pengampu urusan Aset BPKAD memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pendaftaran Sertifikat.

Selain itu BPKAD juga menyelenggarakan Laporan Keuangan (LK) Award setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang telah menyusun laporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, disertai dengan pengungkapa informasi keuangan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Organisasi/Lembaga/Masyarakat

Sebagai pengampu urusan Pengelola keuangan, BPKAD memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait Keuangan Perangkat Daerah. Sedangkan sebagai pengampu urusan Aset, BPKAD memberikan pelayanan pemanfaatan PSU kepada Organisasi/Lembaga/Masyarakat.

c. Akademisi

Sebagai pengampu urusan Pengelola keuangan dan Aset, BPKAD memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait data Keuangan dan Aset dalam pemenuhan kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh akademisi.

d. Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi vertikal dan Pemerintah Pusat

Sebagai pengampu urusan Pengelola Keuangan, BPKAD memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait Keuangan Daerah, evaluasi Keuangan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional. Sedangkan sebagai pengampu urusan Aset, BPKAD memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait Aset BMD kepada instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kota Bekasi masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing - masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKAD Kota Bekasi. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan.

Terhadap permasalahan telah berhasil diidentifikasi tersebut timbul keinginan yang kuat untuk Menyusun dan menetapkan strategi

dalam menyelesaikan isu strategis yang ada dan hal ini menjadi faktor pendukung positive untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh BPKAD Kota Bekasi

TABEL 2.10**PEMETAAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	<p>Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan</p> <p>Belum adanya petunjuk teknis terbaru yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD</p> <p>Tidak sinkronnya data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi serta Pelaporan yang tidak teradministrasi dengan baik</p>
2	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	<p>Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan perangkat daerah dalam penyelesaian pertanggungjawaban Belanja</p> <p>Terdapatnya Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang tidak teradministrasi dengan baik</p> <p>Masih kurangnya Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan/kegiatan di perangkat daerah</p>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Adanya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan/kegiatan
			Kurang tertibnya Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dalam penginputan pajak ke Simda yang sudah disetorkan ke Bank Jabar, sehingga terjadi perbedaan jumlah penerimaan antara penerimaan di Simda dengan jumlah penerimaan di Kas Daerah
3	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Sarana dan prasarana pendukung	Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai
			Belum terintegrasinya sistem aplikasi kas daerah dengan OPD penghasil
4	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD	SDM	Sulitnya memberikan pemahaman terhadap stakeholder terkait tahapan penyusunan APBD
			Masih adanya ketidakpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD
			Kuranginya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran terkait RKA dan DPA SKPD

2.2.2 Isu – isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi kedalam pola analisis SWOT. Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduandiantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

ANALISA SWOT

FAKTOR INTERNAL

1. STRENGTH (KEKUATAN)

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Banyaknya Bimtek tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengelola Akuntansi mempunyai Sertifikat AAP dari IAI.

2. WEAKNESS (KELEMAHAN)

- a. Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan

- penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- b. Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan perangkat daerah dalam penyelesaian pertanggungjawaban Belanja
 - c. Tidak sinkronnya data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi serta Pelaporan yang tidak teradministrasi dengan baik
 - d. Masih adanya ketidakpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD
 - e. Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penganggaran hibah dan bansos sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian pencantuman rekening dalam penganggaran hibah dan bansos Kurangnya ketelitian dan pemahaman terhadap peraturan dalam melaksanakan verifikasi dokumen RKA dan DPA SKPD
 - f. Kurangnya pelaksanaan Bimtek, diklat, pelatihan, sosialisasi terkait Pengelolaan BMD
 - g. Kurang tersedianya gudang penyimpanan BMD rusak berat yang memadai
 - h. Belum adanya JFT Penilai BMD
 - i. Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan asset

FAKTOR EKSTERNAL

1. OPPURTUNITY (Kesempatan/ Peluang)

- a. Banyaknya konsultan luar yang membimbing pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKP /Kemendagri /UNPAD)
- b. Dukungan yang kuat dari BPK agar menjadi WTP
- c. Sertifikasi Akuntansi untuk Aparatur oleh IAI

2. TREATH (ANCAMAN)

- a. Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

- b. Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku
- c. Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD
- d. Adanya kebijakan penggunaan teknologi informai (aplikasi) terpusat dan masih dalam tahap pengembangan yang mengakibatkan kendala dalam proses penyusunan APBD secara cepat dan akurat
- e. Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penganggaran
- f. Masih terdapat potensi aset yang belum tercatat dalam neraca
- g. Kurangnya ketersediaan SDM yang mendukung dalam pengelolaan BMD
- h. Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pemanfaatan BMD

Tabel 2.11
Kesimpulan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS BPKAD KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	1. Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Membangun Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tangguh, dan efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS BPKAD KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	<p>2. Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku</p> <p>3. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan</p> <p>4. Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian</p>					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPKAD KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS BPKAD KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>masing- masing tahapan penyusunan APBD</p> <p>5. pelaksanaan penilaian BMD gedung/bangunan sebagai dasar penentuan premi asuransinya yang mengharuskan melibatkan banyak pihak dan waktu yang cukup sehingga tidak dapat dilaksanakan</p>					

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti tersebut diatas, memiliki keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan akan memudahkan dalam pengawasan keuangan. Di sisi lain masih ada beberapa perangkat daerah kurang memahami manajemen pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset sehingga tercapai sesuai sasarannya.

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, yaitu **“Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif”** dengan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”**. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkontribusi dalam pencapaian sasaran Program Prioritas yang diperkenalkan dengan istilah Gerakan Kobe Berkinerja yaitu melalui program peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota** dengan Indikator Inde Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang secara substansi mencerminkan integrasi dari dua urusan utama yang menjadi kewenangan Badan

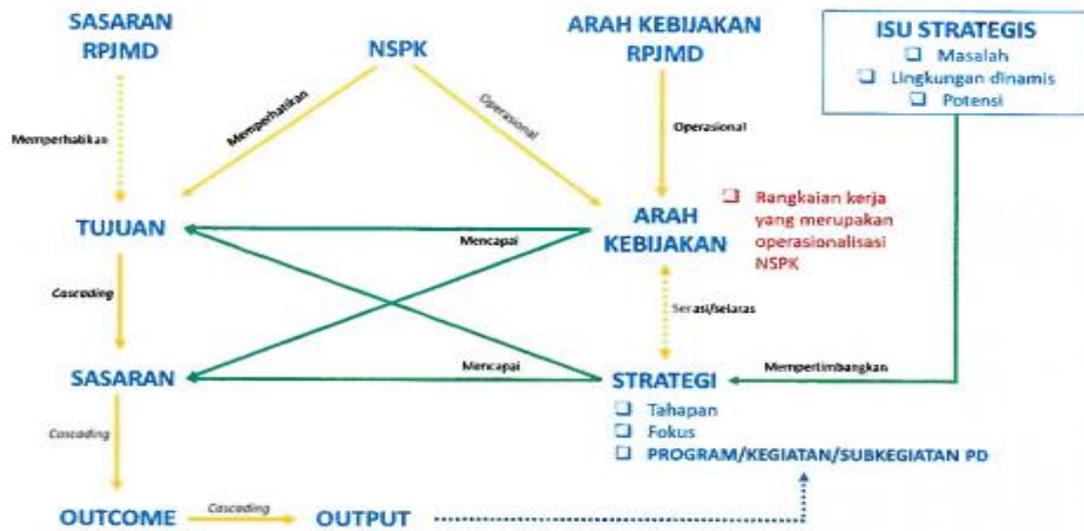
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu urusan keuangan dan urusan barang milik daerah.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

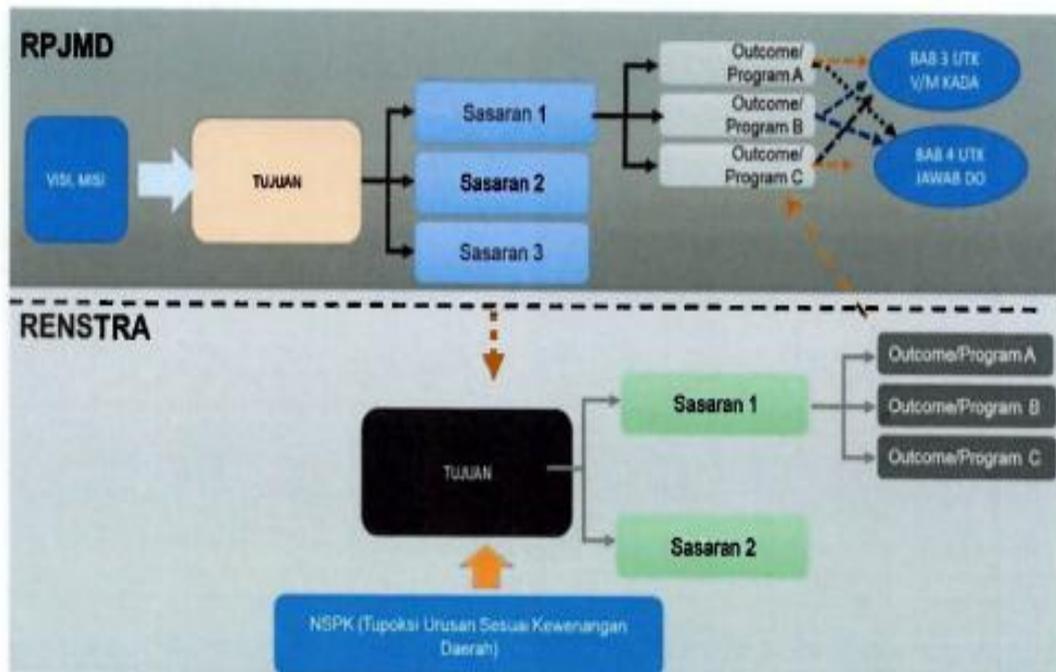
Guna mewujudkan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka ditetapkan sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu **Mencapai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan** dengan Indikator sasaran yaitu **Indeks pengelolaan keuangan daerah.**

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.3 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumber daya dengan yang dimiliki

yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan

Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis kepemudaan dan keolahragaan, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan arah kebijakan provinsi maupun pusat.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya juga dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel	1. Mencapai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan.	1. Peningkatan Kinerja Akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan 2. Peningkatan Administrasi Pengelolaan Aset Daerah	1.Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan asset daerah

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola riset dan inovasi yang bersinergi dengan pengelola keuangan	Penguatan pondasi kelembagaan melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, dan basis data serta media diseminasi	Akselerasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pengelola keuangan	Ekspansi kelembagaan melalui koordinasi, sinkronisasi, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.	Pemantapan kelembagaan yang unggul dalam mendukung terwujudnya tata kelola pengelola keuangan

3.4 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Strategi dan kebijakan adalah langkah – langkah yang berisikan program – program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Daerah. Perumusan Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah dan Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi dasar Strategi dan kebijakan dalam Renstra .

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintah dengan memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan terukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pencapaian tujuan, sehingga mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Peningkatan akuntabilitas tata Kelola pemerintahan	1. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah	

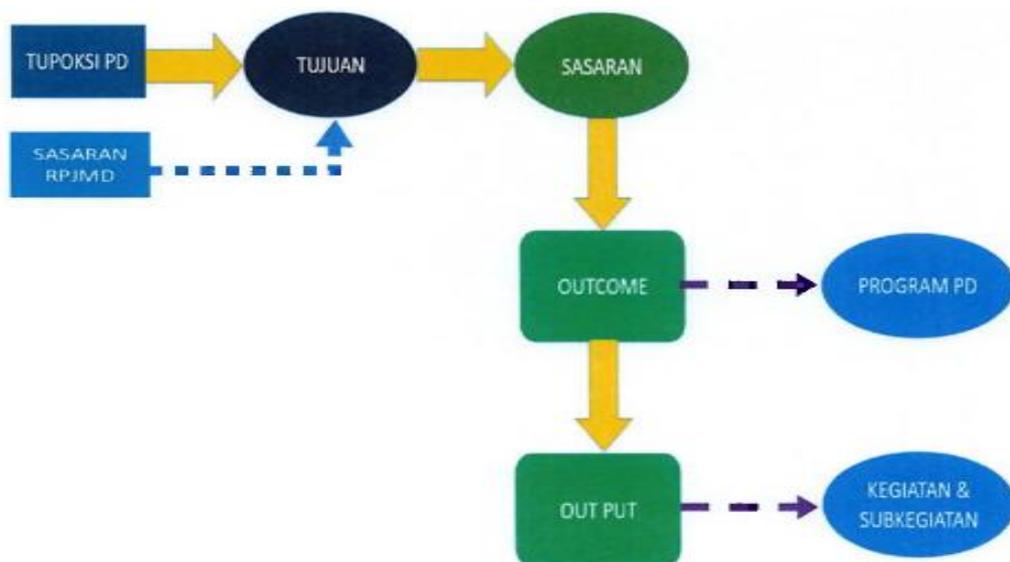
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyusun program-program yang merupakan penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk kegiatan terencana, dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menghasilkan output yang terukur dan memberikan dampak positif (outcome) bagi kemajuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.

Pada tahun 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan 3 (tiga) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Negara; 2. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	<p>Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel</p>	<p>Mencapai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Per undangan – undangan</p>	<p>1. Meningkatnya tata kelola anggaran</p>	<p>1. Jumlah dokumen perencanaan anggaran daerah</p>	<p>1. Ketepatan waktu penetapan APBD</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>A. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran 6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 7. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	2. Jumlah Dokumen Pengelolaan	2. Ketepatan waktu penetapan perubahan APBD 3. Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan 4. Persentase penyerapan belanja daerah	8. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 9. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 10. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 11. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 12. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 13. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Perbendaharaan Daerah 3. Jumlah dokumen pelaksanaan	5. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	14. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 16. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 17. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 18. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		<p>dan Pengeluaran Kas Daerah</p> <p>19. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</p> <p>20. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran</p> <p>21. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>22. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p> <p>23. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			4. Mewujudkan tata kelola barang milik daerah pemerintahan yang profesional dan akuntabel	4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	6. Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 24. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 25. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota 26. Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 27. Penyusunan Standar Harga 28. Penatausahaan Barang Milik Daerah 29. Inventarisasi Barang Milik Daerah 30. Pengamanan Barang Milik Daerah 31. Penilaian Barang Milik Daerah 32. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 33. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			<p>5. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</p> <p>6. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</p>	<p>5. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang</p>	<p>7. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</p> <p>8. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</p>	<p>pemindatanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p> <p>34. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</p> <p>35. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>36. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>37. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>38. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			7. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	<p>disusun sesuai NSPK</p> <p>6. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</p> <p>7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</p>	9. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	<p>39. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>40. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>41. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>42. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>43. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>44. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>45. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>46. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>47. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>48. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>49. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>50. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan atau program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan adanya Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka terdapat beberapa perubahan pada Program/ Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor, Program ini

Nama Kegiatan Dan Sub Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Nama Kegiatan Dan Sub Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

BPKAD Selain menjadi SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD dan juga berdasarkan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021, maka untuk kegiatan, Sub Kegiatan dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bekasi terdapat pada Renstra BPKAD 2025 -2029

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam Penatausahaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.

Nama Kegiatan Dan Sub Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Pengelolaan Barang Milik Daerah**
 - Penyusunan Standar Harga
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah

- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembangunan Sistem Pengelolaan BMD Kota Bekasi
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
URUSAN KEUANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				134.274.849.860		125.241.821.860		125.241.821.860		125.241.821.860		125.241.821.860
Outcome 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penggangan	Indikator : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penggangan	100%	100%	10.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Indikator : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,49%	91%	132.484.372.860	92%	22.495.441.860	93%	22.495.441.860	94%	122.495.441.860	95%	122.495.441.860

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6	6	10.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	5.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		0	-	150	350.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Output : Tersedianya Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi	Indikator : Jumlah Laporan Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi	1438	1438	2.183.620.000	1438	2.343.620.000	1438	2.343.620.000	1438	2.343.620.000	1438	2.343.620.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	7	1.300.000.000	8	1.300.000.000	8	1.300.000.000	8	1.300.000.000	18 Dokumen	1.300.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	60	220.000.000	60	220.000.000	60	220.000.000	60	220.000.000	60	220.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				34.375.000.000		35.687.956.000		36.039.006.000		36.374.756.000		36.374.756.000
Outcome : Meningkatnya tata kelola anggaran			100%	31.360.000.000	100%	32.298.000.000	100%	32.538.850.000	100%	32.755.000.000	100%	32.755.000.000
	Indikator : Ketepatan waktu penetapan APBD	100	100%		100%		100%		100%		100%	
	Indikator : Ketepatan waktu penetapan perubahan APBD	100	100%		100%		100%		100%		100%	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Output : Tersusnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Indikator : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2	300.000.000	2	460.000.000	2	480.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran												
Output : Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Indikator : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1	135.620.000	1	300.000.000	1	369.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah												
Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 dokumen	3	139.640.000	3	220.000.000	3	240.000.000	3	260.000.000	3	260.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	1	1.000.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												
Output : Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	1	30.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)												
Output : Terlaksananya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Indikator : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	2	30.000.000	2	85.000.000	2	100.000.000	2	135.000.000	2	135.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	3	100.000.000	3	153.650.000	3	163.850.000	3	173.450.000	3	173.450.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4	150.000.000	4	197.212.000	4	197.212.000	4	197.212.000	4	197.212.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban												
Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	4 Dokumen	4	70.000.000	4	70.758.000	4	70.758.000	4	70.758.000	4	70.758.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Output : Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	10.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah												
Output : Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Indikator : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Output : Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3	300.000.000	3	508.336.000	3	508.336.000	3	508.336.000	3	508.336.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota												
Output : Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Indikator : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	1951 Orang	1893	500.000.000	1951	500.000.000	1951	500.000.000	1951	500.000.000	1951	500.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota												
Output : Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	53 Lembaga	53	100.000.000	53	100.000.000	53	100.000.000	53	100.000.000	53	100.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah												
Outcome : Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah		1		1		1		1		1	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak												
Output : Terkelolanya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.850.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000
Outcome : Mewujudkan tata kelola barang milik daerah pemerintahan yang profesional dan akuntabel				3.850.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000
	Indikator : Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan		100%		100%		100%		100%		100%	
	Indikator : Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah		71%		72%		73%		74%		75%	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Output : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatangan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
Output : Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatangan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatangan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			TARGET	PAGU								
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
Output : Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	213 Orang	99	300.000.000	99	300.000.000	99	300.000.000	99	300.000.000	99	300.000.000
			-	172.499.849.860	-	164.829.777.860	-	165.180.827.860	-	165.516.577.860	-	165.516.577.860

4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah dirumuskan 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah "**Sapta Program Kota Bekasi Keren**" antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah tersebut, BPKAD Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Mendukung Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA)
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Pendapatan-LO dan Beban	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	
			Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Mendukung Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA)
			Penyusunan Standar Harga	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

4.4. Indikator Kinerja Utama PD

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74,872	75,072	75,272	75,717	76,406	79,782	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

4.5. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pencapaian sasaran strategis di bidang keuangan dan asset daerah. IKK disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif dan efisien.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	34,99	45,18	30	30	30	30	
2	Persentase realisasi anggaran belanja urusan	Persen	84	85	86	87	88	89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	wajib pelayanan dasar								
3	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	4	5	6	7	8	9	
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	22,57	30	40	40	40	40	
5	Persentase penurunan SILPA	Persen	- 15%	-10%	-5%	3	5	8	

Berdasarkan Tabel 4.5, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi telah menetapkan lima Indikator Kinerja Kunci (IKK) strategis yang menggambarkan arah pencapaian pembangunan di bidang keuangan dan asset untuk periode 2025 hingga 2030.

Indikator Pertama adalah Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Indikator Kedua adalah Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar sebagai ukuran seberapa besar anggaran yang telah *direalisasikan* dari total anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar, Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

6. Sosial

Indikator Ketiga adalah Persentase penambahan nilai aset tetap indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan nilai aset tetap suatu pemerintah daerah atau instansi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

Nilai Penambahan Aset Tetap = total nilai aset tetap yang bertambah dalam satu tahun (baik dari pembelian, hibah, pembangunan, atau kapitalisasi belanja modal).

Nilai Aset Tetap Awal Tahun = total nilai aset tetap yang tercatat di neraca pada awal tahun anggaran.

Indikator Keempat adalah Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dibandingkan dengan total belanja daerah.

Indikator Kelima adalah Persentase penurunan SILPA indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Penurunan SILPA menunjukkan bahwa semakin sedikit anggaran yang “tersisa” atau tidak terpakai di akhir tahun, sehingga perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin efisien.

4.6. Keterkaitan dengan Jabar Istimewa

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, BPKAD juga mendukung Pencapaian Jawa Barat Istimewa Langkah Kasalapan: Penyelenggaraan Pemerintah Istimewa dan Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa, Transformasi Birokrasi Berdampak”.

Adapun program dukungan Bapperida Kota Bekasi terhadap Pencapaian Jawa Barat Istimewa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.**Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa**

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa (birokrasi jujur, bersih, dan melayani)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	640	730	805	903	1.010	1.010	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Renstra BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, dan misi kelima “Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait dengan Bapperida Kota Bekasi adalah tujuan “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”, dan sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”.

Renstra BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Tujuan dan 1 (satu) Indikator Sasaran. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, BPKAD Kota Bekasi melaksanakan 3 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan.

Renstra BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPKAD Kota Bekasi berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI**



YUDIANTO, A.KS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1197112031992031005